

BULETIN  
**KONSTRUKSI**

Media Informasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR



# Daftar Isi

## Salam Redaksi

**i-ii**  
Konstruksi Indonesia 2024

## Berita Utama

**1-2**  
Kementerian PUPR Kembali Gelar Konstruksi Indonesia 2024

**3-6**  
Pentingnya Pemahaman Standar dan Regulasi Bidang *Building Information Modeling* (BIM) Serta Penerapannya dalam Proyek Infrastruktur

**7-8**  
*Bitter Sweet* Transformasi Digital

**9-14**  
Individu dan Potensi Fraud dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

## Liputan Khusus

**15-16**  
Mengantar Generasi Muda Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

## Softnews

**17-18**  
Aplikasi SIPASTI dan Keberlanjutannya

**19-20**  
Pembangunan Infrastruktur Mendorong Kemajuan Bangsa

**21-22**  
Transformasi Digital Sektor Konstruksi, Dorong Kemajuan Bangsa

**23-24**  
Kemudahan Proses PBJ dengan SIMPK

## Photo Gallery

**25-28**  
Aplikasi SIPASTI dan Keberlanjutannya

### Dewan Redaksi

**Pembina/Pelindung:** Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, dan Direktur Keberlanjutan Konstruksi. **Kasubag TU:** Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi Harry Setyawan, Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi Leonardus Anggoro Mulia, Dit. Kelembagaan Adhe Hersa Permana, Dit. KPK Arif Wicaksono Affandi, Dit. KK Galuh Sinta Dewi **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** Yosaphat Bisma Wikantayasa. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Agus Firngadi, Nanang Supriyadi, Tasha Mughniar, David Silitonga Muhammad Elan Aqsa. **Redaksi Sekretariat:** Dendy Rahadian, Utami Darma Setiawati, Arif Wicaksono, Galuh Shinta Dewi, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Fatih Fauzi Mustafa, **Desain & Tata Letak:** Ryan Wijisovia.

### Alamat Redaksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Gedung Utama Lt.11, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

# Salam Redaksi

**A**pa kabar para pembaca Buletin Ditjen Bina Konstruksi yang Budiman? Semoga di tahun 2024 ini semua cita-cita para pembaca sekalian dapat tercapai, termasuk cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa maju dapat terwujud. Kita ketahui bahwa Pembangunan Infrastruktur menjadi instrumen utama untuk mengejar ketertinggalan menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menjadi prioritas Pemerintah untuk mendukung peningkatan daya saing nasional, serta pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Tidak mengherankan jika pada tahun 2024 ini, Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. Dari anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%. Tentunya besaran anggaran tersebut harus diikuti kesiapan seluruh rantai pasok industri konstruksi.

Tidak hanya itu, agar dapat seirama dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur, kelincahan dan kemampuan untuk beradaptasi seluruh komponen industri konstruksi menjadi kunci utama. Industri konstruksi harus *agile*

dalam merespon perubahan. Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan dinamika pasar.

Oleh karenanya Konstruksi Indonesia 2024 hadir kembali dengan mengusung tema “*Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing*”. Menjadi komitmen dan semangat seluruh masyarakat jasa konstruksi untuk terus tumbuh bersama dalam menghadapi tantangan dan persaingan global. Konstruksi Indonesia 2024 terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang dimulai sejak bulan Juni 2024 dan puncaknya nanti pada tanggal 6-8 November 2024 di ICE BSD. Semua tersaji lengkap dalam laporan terkait *Launching Konstruksi Indonesia 2024*.

Selain itu pembaca juga disajikan dengan tulisan-tulisan menarik terkait Transformasi Digital Sektor Konstruksi, *Building Information Modelling (BIM)*, Fraud dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Uji Sertifikasi kerjasama dengan ZENI TNI, dan lain sebagainya.

Semoga seluruh artikel yang tersaji dapat menjadi penambah wawasan pembaca sekalian, sekaligus menemani dalam tiap usaha menggapai cita-cita yang telah terpatri dalam sanubari.

***Semangat dan Salam Sehat!***

Redaksi Buletin Konstruksi menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang **(1.)** Bersifat Populer **(2.)** Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Konstruksi serta Informasi terkini Seputar Jasa Konstruksi **(3.)** Panjang tulisan/artikel Minimal 800 kata (1 halaman word) atau Maksimal 2500 kata (2 halaman word) **(4.)** Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email: [hdkp.djbk@pu.go.id](mailto:hdkp.djbk@pu.go.id) dengan Subject : 'Artikel untuk Buletin Ditjen Bina Konstruksi', disertai dengan data diri berupa biografi singkat, alamat, nomor telepon, fax atau email **(5.)** Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis **(6.)** Redaksi berhak melakukan perubahan naskah (editing) tanpa mengubah isi dari tulisan **(7.)** Tulisan yang tidak memenuhi kriteria dewan redaksi Buletin Ditjen Bina Konstruksi **(8.)** Dalam satu Edisi Satu Penulis hanya dapat menayangkan satu artikel.

## Kementerian PUPR Kembali Gelar Konstruksi Indonesia 2024



Penulis:  
**Kristinawati Pratiwi Hadi**  
Pranata Humas Ahli Madya

**K**ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali menggelar event besar Konstruksi Indonesia (KI) di tahun 2024 ini. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis saat *Launching KI 2024*, Selasa (23/7) di Jakarta, Kementerian PUPR menyelenggarakan Konstruksi Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi masyarakat jasa konstruksi, dan menjadi media pertukaran informasi antar *stakeholders* konstruksi.

“Saya mengajak dan mendorong seluruh *stakeholder* jasa konstruksi untuk berkolaborasi dan menyemarakkan KI 2024 ini. Dengan demikian akan tercipta *supply and demand* serta komunikasi antar *stakeholder* jasa konstruksi baik nasional dan internasional sekaligus menjadi ajang promosi untuk mendorong investasi, kreativitas, teknologi konstruksi, dan kegiatan konstruksi nasional”, ujar Abdul Muis.

Konstruksi Indonesia 2024 mengusung tema “*Agility dan Adaptability* Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing”, yang menjadi pengingat bahwa pertumbuhan industri konstruksi yang begitu cepat menuntut kemampuan masyarakat jasa konstruksi untuk beradaptasi dengan perubahan, sehingga diharapkan akan terwujud industri konstruksi yang handal dan berkualitas untuk mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Infrastruktur, mengingat Pembangunan infrastruktur menjadi instrumen utama untuk mengejar ketertinggalan menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita ketahui bahwa Pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas Pemerintah dalam 10 tahun terakhir, dengan tujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan daya saing nasional, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial”, tutur Dirjen Bina Konstruksi.



Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan bahwa di tahun 2024 Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. Dari anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%. “Besarnya anggaran infrastruktur nasional tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi. Saya menekankan, agar dapat seirama dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur, kelincahan dan kemampuan untuk beradaptasi seluruh komponen industri konstruksi menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan”, tegas Abdul Muis.

Industri konstruksi harus *agile* dalam merespon perubahan dengan cepat dan efektif menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan dinamika pasar. Dengan *agility*, peluang baru dapat diidentifikasi, hambatan teratasi, dan tetap kompetitif. Pekerjaan proyek konstruksi harus dapat dilaksanakan dengan pendekatan yang fleksibel dan metode kerja baru, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak.

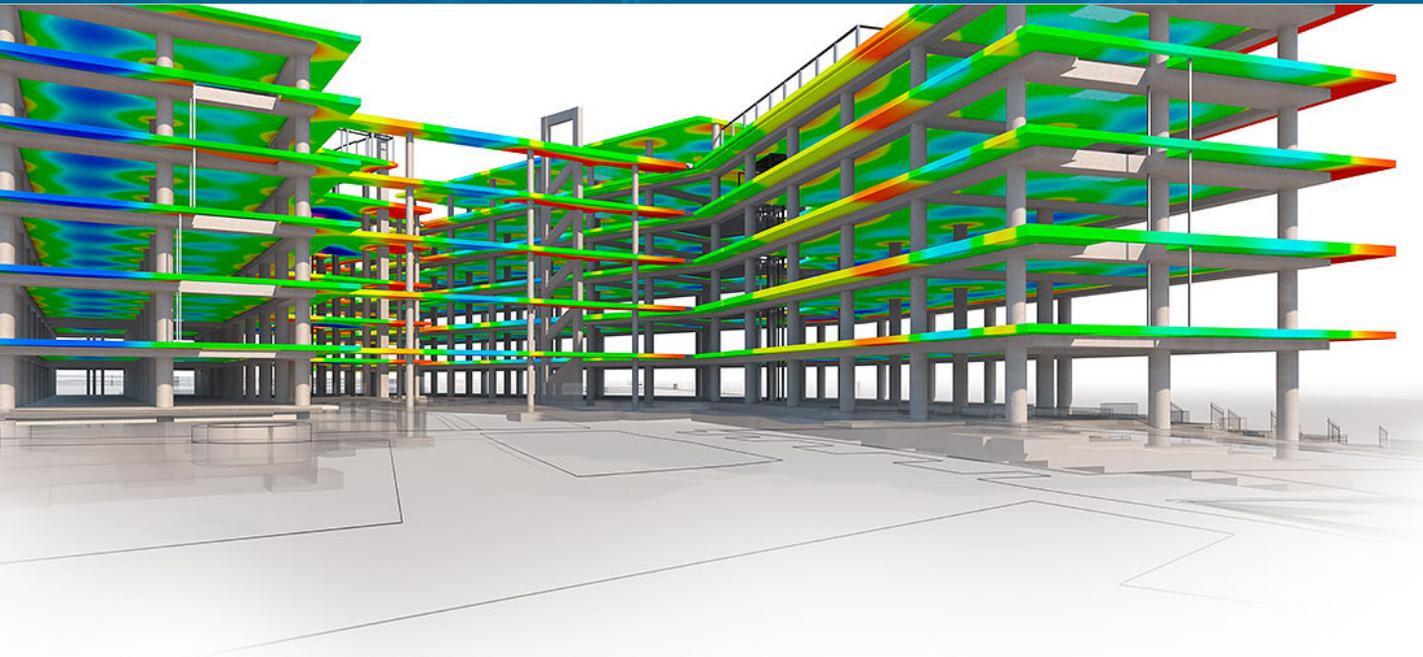
*Adaptability* juga berarti mampu belajar dari pengalaman serta meningkatkan kualitas untuk meningkatkan daya saing. Hingga saat ini, Indonesia menjadi negara dengan peningkatan peringkat daya saing tertinggi di dunia, yaitu berada di peringkat 27, naik 7 peringkat tahun 2023,

sehingga Indonesia masuk dalam 3 besar di Kawasan Asia Tenggara setelah Singapura (peringkat 1) dan Thailand (peringkat 25).

Disinilah kesiapan rantai pasok konstruksi sangat diperlukan. Industri jasa konstruksi diharapkan mampu menjamin kesiapan seluruh sumber daya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, mulai dari Badan Usaha Jasa Konstruksi, tenaga kerja, Rantai Pasok material peralatan, sampai dengan teknologi konstruksi. Oleh karenanya, Konstruksi Indonesia 2024 sangat tepat untuk menjadi ajang bertemunya seluruh Pelaku Konstruksi untuk bertukar pikiran dan berkolaborasi.

Disampaikan oleh *Board of Director* PT. Debindo *International Trade and Exhibitions* Effi Setiabudi sebagai *Event Organizer*, kegiatan Konstruksi Indonesia 2024 telah mulai sejak bulan Juni 2024 dan puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 November 2024 di ICE BSD Tangerang Selatan. Adapun agenda utamanya antara lain: Konferensi; Pameran dan Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024; Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Nasional; Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI); Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2024; serta Lomba Foto dan Video. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <http://konstruksiindonesia.pu.go.id/>. \*

# Pentingnya Kolaborasi dalam Rangka Mewujudkan Ekosistem *Building Information Modeling (BIM)* dalam Proyek Infrastruktur



Penulis:  
Patmasari Anggaraningsih  
JF PJK Ahli Madya, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

**"Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people"**

Steve Jobs

## Hype Digitalisasi Konstruksi dan Anggapan Awam tentang BIM

**B**IM bukan lagi "barang baru" di Indonesia. Geliatnya sudah sangat dirasakan, tidak hanya pada proyek konstruksi di Kementerian PUPR, tetapi para pelaku jasa konstruksi secara umum juga mulai berderap guna meningkatkan kompetensi mereka pada bidang BIM. Tujuannya satu, tak lain tak bukan adalah agar tidak tertinggal dengan hype digitalisasi konstruksi yang tengah menjadi tren saat ini. Digitalisasi konstruksi seolah-olah menjadi jargon baru, didengungkan di setiap sudut untuk membawa semangat efektivitas dan efisiensi dalam proyek konstruksi. Digitalisasi konstruksi yang dikampanyekan diharapkan dapat membawa sektor konstruksi kita menjadi lebih transparan, akuntabel, akurat, dan minim resiko dengan cepat dan tepat. Sesuatu

yang nyaris mustahil bila dilakukan dengan cara-cara yang konvensional.

BIM, bagi kalangan awam, dipandang tidak lebih dari sebuah pemodelan atau kepiawaian dalam mengutak-atik *software*. Selebihnya BIM dipandang hanya untuk memberikan nilai estetik sebuah tampilan bangunan melalui permainan grafis dan geometris. Sejatinya, sebagai representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional suatu bangunan melalui integrasi model virtual, BIM mampu memberikan informasi secara menyeluruh dari elemen bangunan yang kita modelkan. Lebih dari itu, BIM, sebagai *decision support system*, mampu memberikan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan sejak tahapan konsep desain hingga demolisasi bangunan.

Tak jarang kita dengar pertanyaan “BIM-nya pakai apa?”. Arah pertanyaan ini tertebak dan tertuju pada *software* tertentu. Menjawab pertanyaan ini, kita harus menanamkan *mindset* bahwa BIM adalah sebuah metode yang mengedepankan *interoperability*, koordinasi, dan kolaborasi melalui *Common Data Environment* (CDE). *Mindset* yang telah tertanam tersebut harus disebarluaskan dan dipraktekkan secara nyata di dunia konstruksi. Jangan sampai ada kolega atau mitra kerja yang berpendapat bahwa agar perusahaan bisa *leading*, maka harus berinvestasi hanya pada satu *software* tertentu, yang bisa saja harganya selangit dan tidak sebanding

### Kementerian PUPR : Penuhi Ekspektasi, Dorong Kompetensi

Ekspektasi terbesar kita dalam pemanfaatan teknologi tidak hanya sekedar *branding*, tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan proyek infrastruktur kita. Menggaungkan era 4.0 dengan mengandalkan teknologi saja adalah sebuah pertarungan yang tidak akan kita menangkan. Teknologi berupa *hardware & software* hanya akan berfungsi sebagai *tools* jika tidak berada di tangan yang tepat (*brainware*). Ini menggambarkan betapa pentingnya kompetensi sumber daya manusia perlu kita capai dan kita tingkatkan.

Guna memenuhi kebutuhan pemberi kerja dan ketercapaian kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dalam bidang BIM, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina

manfaatnya dengan *Capital Expenditure* (CAPEX) yang telah dikeluarkan. Kita menghindari anggapan bahwa para *engineer* yang menjadi motor perusahaan jasa konsultasi/konstruksi tidak bisa melakukan *review*, *approval*, dan bekerja secara kolaboratif lintas disiplin tanpa bertatap muka.

Jika *mindset* yang telah diuraikan di atas dapat disebarluaskan ke para pelaku industri jasa konstruksi, maka diyakini bahwa *mindset* “*BIM is not just modeling, not just a software*” telah meresap ke paradigma berpikir seluruh *stakeholder*. Jika ini terjadi, maka nilai-nilai baru yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digitalisasi konstruksi akan dapat lebih mudah diterima.

Konstruksi telah menginisiasi penyusunan SKKNI Bidang *Building Information Modelling* (BIM) yang juga telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Kepmenaker Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Building Information Modelling*. Sejak tahun 2022, pelatihan pemodelan BIM juga telah diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) dengan menggandeng salah satu BIM *authoring software*. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mencetak para *Manager BIM*, *Koordinator BIM*, *Modeler BIM*, dan *Juru Gambar BIM*, sebagaimana jabatan kerja tersebut telah ditetapkan dalam regulasi, yang saat ini sudah dinanti-nanti kehadirannya pada berbagai proyek infrastruktur di tanah air.

#### Perlu adanya SDM yang kompeten sesuai dengan standar profesi



Gambar 1. Uraian Kompetensi BIM pada Tataran Strategis dan Taktis

Berdasarkan SKKNI Nomor 3 Tahun 2023, kompetensi dalam tataran strategis harus dapat diampu oleh seorang *Manajer BIM*. Seorang *Manajer BIM* setidaknya harus mampu merencanakan dan mengendalikan BIM dalam organisasi dan penerapannya pada proyek. Dalam tataran

### Peran Tenaga Ahli BIM pada Proyek Konstruksi

Kementerian PUPR telah berperan dalam perjalanan implementasi BIM di Indonesia. Tentu masih banyak PR yang ada di depan mata. Contohnya, BIM masih sebatas dilakukan pada proyek-proyek konstruksi, belum dipersiapkan sejak perencanaan dan perancangan.

Jika kelak ekosistem digitalisasi konstruksi di Indonesia sudah sedemikian berkembang, maka kita akan

taktis operasional, kompetensi untuk mengatur aspek teknis BIM proyek, dan mengelola BIM lintas dimensi diampu oleh seorang Koordinator BIM, sedangkan mengelola pemodelan dan produksi data model diampu oleh seorang *Modeller BIM* dan Juru Gambar BIM.

mendapati para Tenaga Ahli BIM di-*deploy* ke proyek-proyek. Tugas mereka tentu bukan hanya untuk “gaya-gayaan” atau sekedar mengikuti tren penggunaan teknologi digital di dunia konstruksi. Tugas mereka lebih dari itu, yakni bagaimana agar perencanaan yang berbasis BIM bisa mendorong efisiensi dan efektivitas saat pelaksanaan konstruksi, bagaimana kebutuhan informasi saat beroperasi infrastruktur dapat diidentifikasi sejak



Gambar 2. Teknologi *Mixed Reality* yang digunakan di proyek

tahap perencanaan sampai dengan tahap konstruksi di-*hand over* kepada pengguna/pengelola, bagaimana digital *asset* yang telah dibangun kemudian didayagunakan agar proses operasi dan pemeliharaan berjalan dengan efisien dan berkelanjutan.

Lantas, apa langkah-langkah yang harus disiapkan agar seorang TKK merasa pede ketika menyebut dirinya “Tenaga Ahli BIM”? Untuk menjawab pertanyaan ini, sangat penting rasanya bagi seorang TKK untuk memahami berbagai standar yang terkait dengan BIM (SKKNI No. 3 Tahun 2023, ISO 19650) secara menyeluruh, sehingga setelah menerima Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau dokumen *tender* dari Pemberi

Kerja, dapat segera menerjemahkan/menerapkannya pada proyek konstruksi melalui pembuatan *BIM Execution Plan (BEP)* yang menggambarkan seluruh *input*, proses dan *target output BIM (BIM Uses)* yang akan dicapai, penyusunan *Task Information Delivery Plan (TIDP)* dan *Master Information Delivery Plan (MIDP)* yang akurat, pembuatan *workflow* yang dapat menggambarkan alur koordinasi, *review*, dan *approval*, mampu men-*setup Common Data Environment (CDE) platform*, menyusun rencana *Task Team*, menganalisis risiko, merencanakan produksi data model, dan melakukan penjaminan mutu terhadap data model BIM. Contoh nyata kolaborasi, *interoperability*, dan koordinasi sesederhana terlihat pada penggabungan *single model* ke dalam

*federated model*. *Single* pada disiplin arsitektur, struktur, *landscape*, dan *Mechanical Electrical Plumbing (MEP)* dibuat dan digabungkan dalam sebuah *federated model*. Dalam proses ini tentunya ada proses *review* oleh seorang

### Penutup

Upaya mewujudkan transformasi digital di dunia konstruksi telah dilakukan secara masif oleh segenap *stakeholder* jasa konstruksi. PR yang tersisa memang masih banyak, baik dari sisi Pemerintah (dalam hal ini Kementerian PUPR sebagai Pemberi Kerja/Pengguna Jasa), maupun dari sisi Penyedia Jasa Konsultasi/Konstruksi, Asosiasi, serta Akademisi. Namun mencermati berbagai capaian standar dan regulasi yang telah disusun, serta *output* berupa aset infrastruktur yang dihasilkan, kita patut berbangga karena perjalanan BIM di Indonesia

*Manager* BIM, Koordinator BIM, dan ditindaklanjuti oleh *Modeller* BIM atau Juru gambar BIM.

pada *track* yang benar. Seperti kata Steve Jobs: *Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people*. Perjalanan BIM di Indonesia tidak akan pernah sampai pada ekosistem transformasi digital yang dicita-citakan jika hanya dilakukan seorang diri. Ada kolaborasi antar jabatan kerja, kolaborasi antar *stakeholder*, *awareness* dan *mindset* yang tumbuh untuk mendukung implementasi digitalisasi di sektor konstruksi. Salam transformasi.

# Bitter Sweet Transformasi Digital



Penulis:

**Meylina Hasbullah**

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya

**E**ra Digital apakah sekarang telah masuk ke semua lini kehidupan? Sadar atau tidak, sejak kita bangun tidur, kebiasaan penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari sudah mempengaruhi ritme bekerja bahkan menjadi cara hidup. Mulai dari mencari informasi melalui aplikasi, *tap emoney* untuk naik transportasi umum, *maps* untuk navigasi, *share locations*, absen di Bravo PUPR, *tap ID Card* masuk kantor, *transfer* melalui *m-banking*, pemesanan makanan, belanja *online*, komunikasi melalui *chat*, tata naskah dinas elektronik, tanda tangan elektronik, registrasi, pembelajaran jarak jauh, rapat daring, bahkan kolaborasi pekerjaan secara *virtual*. Semua hal tersebut membuat hidup menjadi efisien dan cepat, kendali terasa ada di tangan.

*Internet* sudah seperti kebutuhan pokok, tiada hari tanpa mengharapkan keberadaannya. Kemudahan hidup karena serba digital ini perlu kedewasaan dan kesiapan dalam berbagai hal. Informasi yang didapat dengan

gampang, bila tidak hati-hati juga meminta data si pengguna. Keindahan serba digital tersebut terasa pahit saat kuota *internet* habis, *wifi* tidak ada, dan data tidak bisa diakses. Lebih pahit lagi karena adanya kejahatan siber seperti *phising*, peretasan, *cyber stalking*, *cyber bullying* bahkan *ransomware*. Betapa keamanan penyimpanan data perlu diantisipasi. Rutinitas digital yang serba cepat dan efisien berbalik menjadi kekacauan bila celah seperti ini menganga.

Mengingat perjalanan tahun 2024 secara positif, ditandai dengan telah berakhirnya covid-19 sebagai pandemi di Indonesia, geliat ekonomi mulai kembali, *work from home* tidak menjadi keharusan, penyelenggaraan pileg-pilpres-pilkada, dan Renstra DJBK 2020-2024 akan berakhir.

Sedikit menilik kembali sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama 5 tahun ini, diantaranya peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;

peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa; peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi; peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, peningkatan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi; peningkatan dukungan layanan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; serta peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.

Dalam menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang tersebar di 7 provinsi serta Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang tersebar di 34 provinsi.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki mitra kerja yang terdiri atas: Pemerintah Daerah, Instruktur dan Asesor, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Tenaga Kerja Konstruksi, Lembaga Sertifikasi, Asosiasi, Penyedia Jasa, serta Kementerian/Lembaga. Masing-masing mitra kerja ini menggunakan sistem informasi tersendiri sehingga interoperabilitas data diperlukan dalam mengembangkan hubungan kerja yang efektif, berkinerja sesuai dengan tujuan dan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Digitalisasi juga masuk dalam Renstra DJBK 2020-2024, dimana arah kebijakan strategi pembinaan jasa konstruksi diantaranya: mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan sistem informasi kinerja penyedia jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR; menyediakan informasi material, peralatan dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri; peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; serta peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi.

Peran DJBK bersama dengan mitra kerja dalam interoperabilitas sistem informasi yang dapat diakses publik dan pengambil keputusan, memerlukan langkah-langkah strategis dan berkesinambungan. Alangkah baiknya bila langkah-langkah tersebut dilakukan sebagaimana *roadmap* Pembinaan Konstruksi 2045 yang dikeluarkan oleh DJBK, sehingga patokan dalam perkembangan arah kebijakan selanjutnya berdampak massive. Dalam *roadmap* tersebut telah diklusterkan substansi pembinaan konstruksi dan keterkaitan dengan mitra kerja maupun pentahapan yang perlu dilakukan hingga 2045.

Optimalisasi unit kerja di lingkungan DJBK dan mitra kerjanya, menjadi proses berulang menyamakan langkah dengan transformasi digital serta tantangannya di Indonesia. (meylina.hasbullah@pu.go.id)

# Individu dan Potensi *Fraud* dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa



FRAUD

Penulis:

**Nanang Rianto**

Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo

## Hype Digitalisasi Konstruksi dan Anggapan Awam tentang BIM

**P**engadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional juga daerah. Sebagai gambaran betapa strategisnya instrumen pengadaan, pada tahun 2022 terdapat Rp. 1057 Triliun anggaran belanja pengadaan. Nilai tersebut hampir separuh dari total anggaran belanja nasional sebesar Rp. 2131,6T.

Kementerian PUPR sebagai pengemban amanah pembangunan infrastruktur di tahun 2024 diberikan amanah pagu anggaran sebesar Rp. 149,7 T dengan rincian antara lain untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp 48,4 triliun, bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 56,56 triliun, dan seterusnya. Disini posisi pengadaan barang/jasa amat strategis dalam kaitannya

untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tepat dan berdampak terhadap masyarakat. Dari premis tersebut, maka amat penting untuk menjaga agar proses pengadaan barang/jasa berjalan dengan adil dan minim kecurangan.

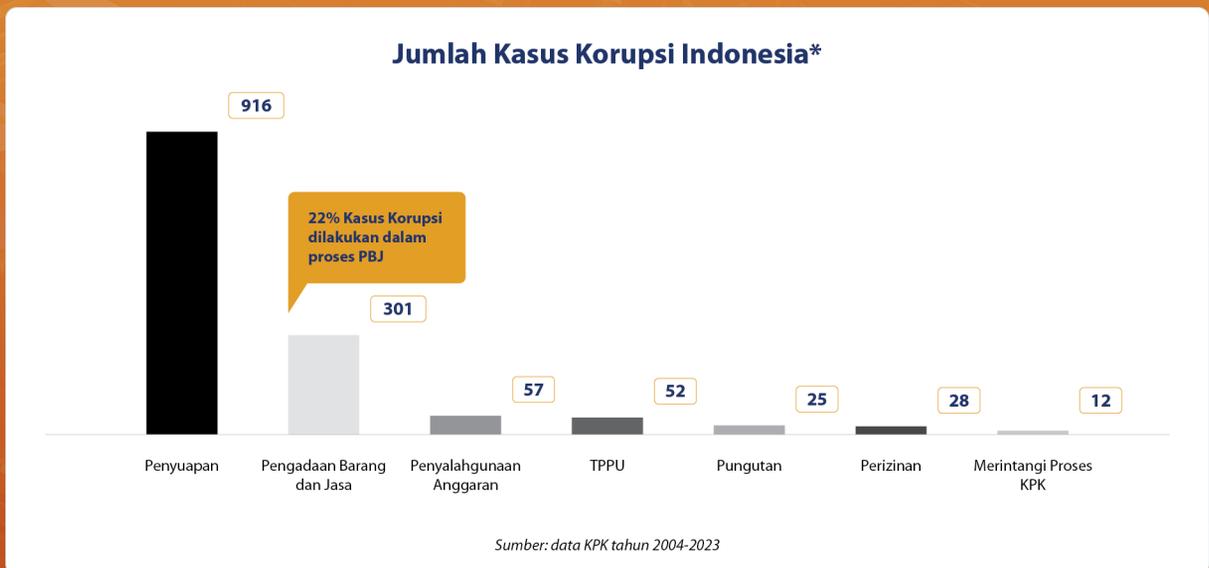
Salah satu langkah untuk memastikan hal tersebut adalah penggunaan sistem informasi pada PBJ, dimana sejak 2008 proses pengadaan barang/jasa telah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tujuan diadopsinya sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu efisiensi yang terjadi adalah meminimalisasi frekuensi pertemuan dan komunikasi antar para pihak yang berkepentingan, yaitu penyedia jasa, pemilik pekerjaan dan kelompok kerja pemilihan.

## Potensi kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa kaitannya dengan individu dan organisasi

Walaupun telah mengadopsi sistem pengadaan secara elektronik, proses pengadaan masih memungkinkan untuk terjadinya kecurangan, beberapa penyebabnya menurut literatur adalah kurang akuratan perencanaan pengadaan, kurang ketatnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas serta tingkat profesionalisme yang rendah dalam birokrasi (Del Monte & Papagni, 2007; Kolstad & Wiiig, 2009; Pellegrini & Gerlagh, 2007). Lebih lanjut, di era digital seperti sekarang ini risiko kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pun berkembang (Kamal,2022). Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa terdapat 22% kasus korupsi yang berhubungan dengan

pengadaan barang dan jasa.

Karyawan (Murray, 2014). Ada studi menarik dari Rustiarini (2019) mengenai aspek individu birokrasi yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Studi ini mencoba menyoroiti alasan-alasan dan motif kenapa seorang individu melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Tulisan ini akan membahas mengenai krusialnya faktor individu dalam pengadaan barang/jasa. Jika individu yang terlibat dalam proses pengadaan sangat rentan berpotensi melakukan kecurangan ataupun kesalahan, maka diperlukan suatu pendekatan khusus dan strategi untuk para individu tersebut.



### Teori *fraud diamond*

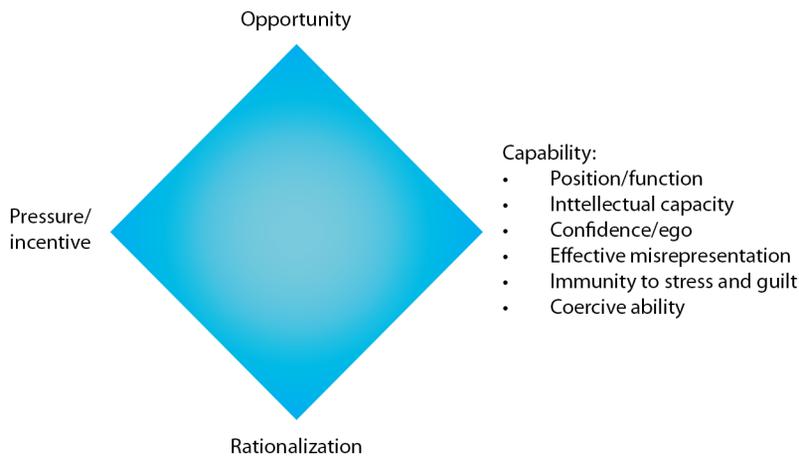
Teori ini ditemukan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) yang menyempurnakan teori *fraud triangle's* (segitiga kecurangan) dari Cressey (1953). Elemen utama teori Cressey adalah kecurangan (*fraud*) terjadi jika satu atau lebih dari tiga elemen hadir. Tiga elemen tersebut adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (Rustiarini, 2019).

Wolfe dan Hermanson (2004) memodifikasi aspek kesempatan (*opportunity*) untuk melengkapi keterbatasan dari teori segitiga kecurangan. Mereka mengemukakan bahwa individu yang melakukan kecurangan bukan hanya membutuhkan kesempatan namun juga memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk mengeksploitasi kesempatan tersebut.

<sup>1</sup> Profil Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022, LKPP

<sup>2</sup> Rilis Biro Komunikasi Publik tgl 1 April 2024, nomer SP.BIRKOM/IV/2024/107

<sup>3</sup> N Setiani, SN Huda, R Pulungan, E Winarko, 2017, *Transformation of Fraud Activities In Procurement System in Indonesia, The International Conference on Information Technology and Digital Applications.*



Sumber: Wolfe and Hermanson (2004)

### Tekanan (*pressure*)

Secara umum terdapat tiga kategori tekanan: i) tekanan pekerjaan, ii) tekanan ekonomi, iii) tekanan sosial. Tekanan pekerjaan bisa dibagi menjadi dua, yaitu tekanan internal dan eksternal. Tekanan internal merupakan tekanan dari dalam organisasi, misal: tekanan dari pemilik kewenangan. Tekanan eksternal datang dari luar organisasi yang mempunyai kekuatan, misal individu terafiliasi kekuatan politik atau pemilik bisnis. Tekanan kedua yaitu tekanan ekonomi yang disebabkan

karena individu yang terlibat merasa pendapatannya tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Hal ini membuat individu yang tidak puas mengharapkan kompensasi melalui sejumlah cara (Blackburn et al., 2011). Tekanan terakhir yaitu tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Tekanan jenis ini biasanya terjadi jika individu yang terlibat pengadaan memiliki koneksi dengan penyedia jasa ataupun pihak lain yang terkait dengan paket yang ditenderkan (OECD, 2007).

### Kesempatan (*opportunity*)

Aspek kesempatan terjadi jika ada celah dalam peraturan/kebijakan terkait pengadaan. Peningkatan sistem akuntabilitas baik internal dan eksternal terkait dengan aspek ini. Peraturan yang ketat pada satu rentang waktu mungkin akan menurunkan potensi kecurangan, namun dampak lainnya adalah kemungkinan penyimpangan yang lebih tinggi (Mahmood, 2005). Masih menurut Mahmood, pengawasan internal dan eksternal yang relatif efektif masih memungkinkan individu internal

untuk menemukan *blind spots* yang belum terdeteksi dalam peraturan. Beberapa hal lain yang menyebabkan munculnya kesempatan antara lain belum efektifnya organisasi melakukan evaluasi dan tinjauan manajemen berkala terhadap individu yang terlibat proses pengadaan. Beberapa instrumen kontrol yang biasanya dilakukan adalah pemisahan dan pembagian tugas serta rotasi berkala individu.

### Rasionalisasi

Aspek ini bisa disebut sebagai "pembenaran" kenapa melakukan kecurangan. Semakin tinggi satu individu melakukan kecurangan, semakin tinggi pula rasionalisasi (pembenaran) yang dilakukan (Zyglidopoulos et al., 2009). Rasionalisasi yang dilakukan misalnya terlihat

dalam beberapa ungkapan berikut: "orang lain juga melakukannya", "tidak ada yang dirugikan", "ini bukan masalah besar" (Albrecht et al., 2015; Mayhew and Murphy, 2014)

## Kapabilitas

Beberapa karakteristik aspek ini antara lain: i) pelaku memiliki posisi/fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan; ii) memiliki kapasitas intelektual yang melebihi rekan sejawatnya untuk mengeksploitasi kelemahan dalam proses pengadaan (Wolfe and Hermanson,

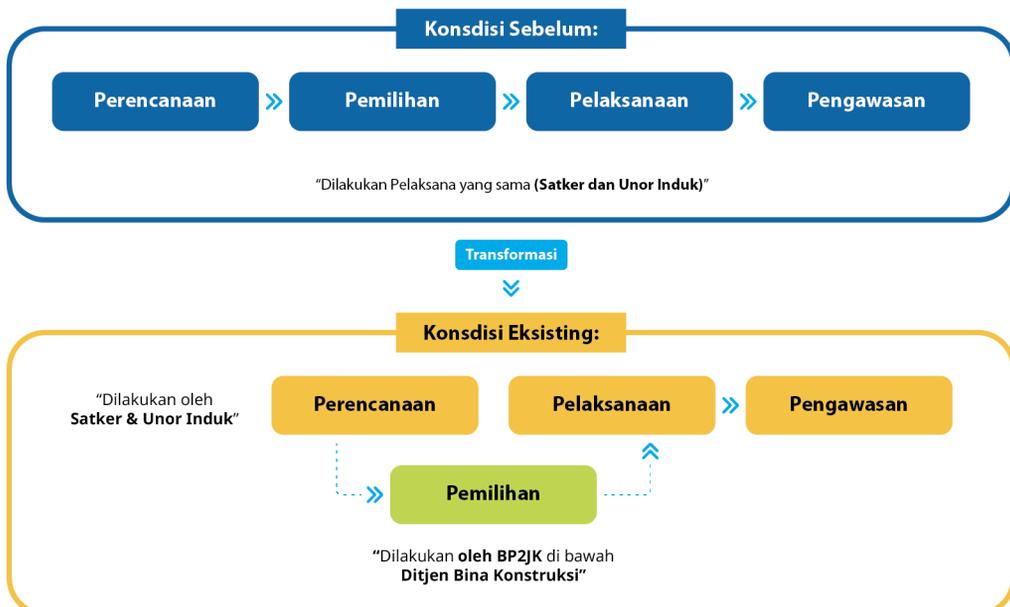
2004); iii) tingkat percaya diri yang tinggi yang meyakini perbuatannya curangnya tidak akan terdeteksi (Dorminey et al., 2012); iv) Mempunyai kemampuan membujuk orang lain untuk melakukan kecurangan bersama.

## Proses bisnis pengadaan barang/jasa di BP2JK Kementerian PUPR

Pada tataran kebijakan, secara umum ada 9 strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR. Strategi tersebut adalah: i) reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja PBJ, ii) perkuatan SDM, iii) perbaikan mekanisme harga perkiraan sendiri, iv) pembinaan vendor (kontraktor & konsultan), v) pemeriksaan hasil pekerjaan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan (BPKP), vi) implementasi manajemen risiko di tiap balai dan satker, vii) pembentukan unit kepatuhan internal sebagai *second line of defence*, viii) pembentukan inspektorat bidang investigasi dan penguatan kapasitas auditor itjen serta ix) pemantauan berkelanjutan pencegahan fraud PBJH dengan teknologi

informasi terintegrasi.

Proses bisnis pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian PUPR mengalami transformasi yang cukup mendasar pada tahun 2021. Salah satu transformasi tersebut adalah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri PUPR No. 1620/KPTS/M/2021 tentang pembentukan UKPBJ dan UPTPBJ Kementerian PUPR. Proses pengadaan barang/jasa sebelumnya dilaksanakan oleh pihak yang sama (satuan kerja dan unit organisasi induk) menjadi dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di bawah Ditjen Bina Konstruksi.



Sumber: Ditjen Bina Konstruksi, 2022



### Individu pelaksana lelang sebagai fokus pencegahan

Individu yang terlibat dalam proses pengadaan terdiri dari beberapa tim/kelompok. Di unit BP2JK, kelompok tersebut adalah tim pelaksana, kelompok kerja (pokja) dan tim peneliti. Tahap pemilihan proses pengadaan barang/jasa merupakan proses penting yang dilaksanakan oleh pokja. Sehingga sangat krusial untuk memastikan individu yang terlibat di dalam pokja berada dalam kondisi terbaiknya secara fisik dan mental. Beban kerja, tingkat kelelahan serta stress individu pokja merupakan hal-hal yang membutuhkan perhatian khusus.

Belum ada standar pasti tentang beban kerja ideal kelompok kerja dalam pengadaan barang dan jasa. Ini bergantung pada berbagai faktor seperti ukuran kelompok kerja, tingkat kompetensi anggota, tingkat kompleksitas proyek, dan sumber daya yang tersedia.

Beban kerja yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kelelahan dan stres pada anggota kelompok kerja, serta menurunkan produktivitas dan efisiensi. Oleh

karena itu, penting untuk memastikan bahwa beban kerja yang diberikan memperhitungkan kemampuan dan keterbatasan anggota kelompok kerja. beban kerja yang berat yang dialami dalam jangka panjang akan mempengaruhi kesehatan tenaga kerja baik fisik dan mental, sehingga adanya respon dari situasi di sekitar tempat kerja menjadi bahaya atau ancaman seperti rasa takut, cemas, rasa bersalah, marah, sedih, putus asa dan stres (Chen, 2010).

Penting bagi manajemen untuk mengatur dan memantau beban kerja kelompok kerja secara teratur dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa beban kerja tetap dalam batas sehat bagi anggota kelompok kerja. *Burn out* dalam pekerjaan, utamanya jika mendera individu dalam pokja merupakan risiko yang perlu dimitigasi. Individu pokja yang berada dalam kondisi prima akan berpengaruh kepada proses PBJ yang relatif baik.

### Strategi mengurangi potensi penyimpangan (*fraud*) pada individu

Setelah menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu dalam hubungannya dengan potensi penyimpangan, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi hal tersebut. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah i) menentukan standar beban kerja individu pokja. Standar ini memungkinkan untuk mengurangi tekanan (*pressure*) beban pekerjaan dan memperkecil kesempatan (*opportunity*) terpelelet melakukan penyimpangan. Beban kerja seseorang dalam suatu pekerjaan antara lain adalah jenis pekerjaan, situasi pekerjaan, waktu respons, waktu penyelesaian yang tersedia dan faktor individu seperti: tingkat motivasi, keahlian, kelelahan, kejenuhan, serta toleransi performansi yang diijinkan (Risma, 2010). Karakter pekerjaan yang dilakukan oleh anggota pokja dalam proses pengadaan yang sangat dibatasi oleh waktu dan tekanan intimidasi dari pihak eksternal merupakan beban kerja yang harus dialami. Pembatasan jumlah paket maksimal untuk individu pokja setidaknya dapat mengurangi *pressure* yang ada. Berkurangnya tekanan tersebut pada gilirannya akan meminimalisasi peluang (*opportunity*) untuk berbuat menyimpang. Hasil penelitian Shah, dkk (2011) menjelaskan bahwa beban kerja memiliki hubungan yang signifikan terhadap performa pekerja. Semakin ideal beban kerja individu pokja, pada gilirannya akan meningkatkan kinerjanya.

Strategi lain yang bisa dilakukan selain menentukan standar beban kerja adalah ii) merumuskan mekanisme untuk mengukur tingkat kelelahan/kejenuhan anggota pokja. Hal ini dilakukan sebagai salah satu instrumen untuk memantau kondisi individu pokja di tengah tahun berjalan. Kegiatan yang bisa dilakukan di antaranya *survey*, observasi sampling dan wawancara pokja di beberapa BP2JK Wilayah, memetakan data kinerja proses evaluasi pengadaan hingga penilaian kesehatan mental yang dilakukan oleh petugas kesehatan/psikolog profesional. Deteksi dini terhadap tingkat kelelahan/kejenuhan pokja penting untuk memetakan kondisi kesehatan mental para individu pokja sehingga bisa ditentukan langkah untuk perbaikan yang diperlukan.

Mekanisme alternatif lain yang bisa dirutinkan adalah iii) merumuskan bentuk sarana komunikasi rutin bagi individu pokja. Kegiatan ini bisa berupa *coffee morning* terjadwal, *sharing knowledge* dengan praktisi pengadaan di internal maupun eksternal kementerian. Pertemuan tersebut bisa bertemakan banyak hal, misal aturan-aturan terbaru terkait pengadaan barang dan jasa hingga *lesson learned* keberhasilan dari pokja di satu wilayah. Komunikasi non formal yang dirutinkan diharapkan bisa meningkatkan kapabilitas pokja yang pada gilirannya dapat mengurangi rasionalisasi penyimpangan.

# Mengantar Generasi Muda Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045



Penulis:

**Fatih Fauzi Mustafa**

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama

**S**emburat semangat memancar dari wajah Prajurit-Prajurit Negara pagi itu. Meski cuaca yang sedang hangat menarik keringat mengalir di tubuh mereka namun tidak menyurutkan keinginan untuk belajar, mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi Bidang Konstruksi. Serda (K) Angelina Joelvianata, salah satu Srikandi bangsa mengatakan bangga dapat mengikuti pelatihan ini. "Saya tidak menyangka bisa mengikuti Uji dan Pelatihan bidang konstruksi. Selama ini saya berpikir bidang konstruksi hanya bisa diikuti oleh laki-laki. Ya saya berharap ilmu konstruksi ini berguna untuk masa depan saya", ungkap Serda (K) Angelina.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Serda Aldi Isak Selan, peserta Pelatihan dan Uji Sertifikasi yang lain. "Saya merasa senang dapat mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi bidang konstruksi. Semoga ilmu yang saya pelajari dan dapatkan bisa berguna untuk membangun bangsa dan Negara, serta Sertifikatnya bisa mendukung

karir saya di masa depan", ujar Serda Aldi peserta Pelatihan dan Uji Sertifikasi Konstruksi.

Demikian pernyataan dari peserta pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bidang Konstruksi yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Zeni (Pusdikzi) TNI Angkatan Darat, Kamis dan Jumat (30-31/05) di Bogor dan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta.

Peserta kegiatan ini adalah sebanyak 250 orang Siswa dan Organik Pusdikzi. Dimana 214 orang peserta diuji di Pusat Pendidikan Zeni Bogor, dan 36 orang peserta di *Workshop* Alat Berat di Kampus Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Jalan Suratmo Jakarta. Jabatan kerja yang diujikan antara lain : Tukang Cat Bangunan Gedung, Tukang Besi Beton, Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan, Tukang Bangunan Gedung, Operator *Backhoe Loader*, Operator *Bulldozer*, Operator *Dumpt Truck*, Operator

*Wheel Excavator, Operator Motor Grader dan Operator Vibrator Roller.*

Menurut Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Kementerian PUPR Samuel EDP Tampubolon, mendukung tugas pokok Pusat Zeni Angkatan Darat, diantaranya adalah mencetak Prajurit Zeni yang profesional di bidang konstruksi. Hal ini mengingat bahwa Pasukan Zeni TNI AD selain berperan aktif dalam membantu tugas tempur, namun juga memiliki tugas pemulihan kawasan, perumahan, dan pemukiman sementara di daerah terdampak bencana alam. Dimana menurut data BNPB, pada periode 2020 sampai dengan 2024 di seluruh Indonesia telah terjadi 16.643 kejadian bencana alam, mulai dari bencana banjir dan tanah longsor sampai dengan gempa bumi dan tsunami.

“Sehingga kita ketahui bahwa bagaimana TNI AD berperan aktif memulihkan daerah-daerah bencana tersebut bersama dengan Kementerian PUPR”, ungkap Kepala BJKW III Jakarta. Tidak hanya itu, Pasukan ZENI TNI AD juga membantu pemulihan sarana prasarana di daerah terdampak konflik *horizontal*, konstruksi prasarana militer khususnya di daratan, serta pembangunan perkubuan khususnya konstruksi dan destruksi militer di medan perang.

Uji sertifikasi ini juga menjadi wujud nyata Amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 ayat 1, dimana disebutkan bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi

wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja atau yang biasa disebut SKK. Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta telah melakukan upaya pemenuhan kepemilikan kompetensi kepada pihak vokasional seperti SMK maupun perguruan tinggi, serta kategori reguler yaitu masyarakat jasa konstruksi. Sehingga diharapkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi dapat diisi oleh pekerja konstruksi kompeten yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

Komandan Pusat Pendidikan Zeni Kolonel CZI Andy Setiawan pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR atas kerjasamanya dalam mendorong kualitas SDM di Pusdikzi TNI AD. “Kami berharap Kerjasama ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Bahkan kami rencanakan dalam waktu dekat akan dilakukan pelatihan PBJ untuk jajaran Perwira kami”, ujar Andy Setiawan.

Diharapkan dengan Sertifikasi dan Pelatihan tenaga kerja konstruksi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, turut mendorong kualitas SDM, mengantar generasi muda bangsa menuju Indonesia Emas 2045. \*

# Aplikasi SIPASTI dan Keberlanjutannya



Penulis:

**Fatih Fauzi Mustafa, S.T.**

*Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama*

**H**arga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan harga yang diasumsikan oleh pemilik proyek melalui perhitungan yang terukur sebagai pedoman evaluasi terhadap penawaran yang dilakukan oleh penyedia jasa. Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah, pemilik proyek merupakan pemerintah itu sendiri. Perhitungan HPS menjadi penting dalam siklus hidup proyek karena akan dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menilai kewajaran dan mengevaluasi harga penawaran penyedia jasa. Besaran nilai harga penawaran yang ditawarkan oleh penyedia jasa kepada pemerintah dapat sangat bervariasi yang dapat diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya perhitungan bisnis masing-masing penyedia jasa.

Tetapi tidak hanya harga penawaran oleh penyedia jasa yang dapat sangat bervariasi dalam pelaksanaannya, HPS pun dapat bervariasi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi pasar, fluktuasi harga

material, serta berbagai kebijakan ekonomi dalam suatu wilayah. Ketidakpastian sumber data penyusun HPS tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan potensi penyimpangan (*fraud*), salah satunya asumsi-asumsi yang tidak akurat serta tidak wajar terhadap tren pasar terkini dan penetapan harga material penyusun HPS. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada kualitas HPS, lebih jauh lagi tingkat keberhasilan suatu proyek akan terdampak oleh nilai HPS proyek tersebut.

Inisiasi terkait kebijakan mekanisme penyusunan HPS telah dimulai sejak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerbitkan kebijakan 9 (Sembilan) Strategi Pencegahan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR, yang salah satunya adalah perbaikan mekanisme penyusunan HPS dengan *output* berupa *database* HPS. Sejalan dengan tujuan peningkatan keandalan penyusunan HPS, Menteri PUPR juga mengamanatkan melalui Permen PUPR Nomor 8 tahun

2023 bahwa HPS perlu disusun menggunakan aplikasi berbasis data sistem informasi HPS, yaitu Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI).

Pada tahun 2021, pemanfaatan SIPASTI juga didukung oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK), berkolaborasi dengan Kementerian PUPR memulai pengembangan database harga satuan dengan *pilot project* penerapan SIPASTI di 10 provinsi, dan kemudian dilanjutkan pada periode 2023 - 2024 untuk *pilot project* 136 paket di 34 provinsi dan penerapan SIPASTI tahun 2024 untuk seluruh paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR.

SIPASTI dalam perjalanannya telah mengembangkan 5 sistem utama diantaranya : Sistem Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah; Sistem Perhitungan HPS; Sistem Pembahasan, Penetapan, dan Reviu HPS; Sistem Database HPS; dan Sistem Monitoring. Berbagai proses pengembangan seperti rangkaian pertemuan dengan para *stakeholder* dilakukan guna merumuskan suatu sistem informasi yang bisa mengakomodir kebutuhan setiap proses bisnis penyusunan HPS pekerjaan konstruksi. Sejumlah 3510 rumusan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pada seluruh bidang (Umum, SMKK, SDA, BM, CK, dan Perumahan) telah terakomodir dan *tools* perhitungan AHSP juga telah lolos uji *quality control* melalui Direktorat Bina Teknis Unit Organisasi.

Dalam pemanfaatannya yang membutuhkan banyak data dan informasi dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi, SIPASTI juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya meliputi : Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ); e-HRM; Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); *e-monitoring*; E-Katalog LKPP; dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Upaya penjaminan keamanan data dengan jumlah besar pada SIPASTI serta berbagai sistem informasi terintegrasi yang menyertainya juga dilakukan dengan berbagai cara. Pengoptimalan keamanan aplikasi melalui serangkaian tes seperti *vulnerability test* dan *penetration test* dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor terjadinya risiko terhadap sistem jaringan yang telah dikembangkan. Pemanfaatan akun *Single Sign On (SSO)* juga diterapkan sebagai bentuk akuntabilitas para pihak yang terlibat dalam penyusunan HPS. Selain memperkuat aspek keamanan terhadap sistem jaringan, keandalan sistem

terus ditingkatkan melalui *continuous improvement*, *pilot project* di 136 paket pekerjaan konstruksi, serta serangkaian uji coba keandalan sistem perhitungan, pembahasan, dan simulasi HPS sektoral.

Perbaikan ekosistem mekanisme penyusunan HPS yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, selain dalam mengembangkan SIPASTI, juga dilakukan pemutakhiran dan harmonisasi regulasi. Hal demikian sebagai langkah dalam mengatasi berbagai isu dan permasalahan penyusunan HPS. Contohnya adaptasi regulasi dan pemutakhiran ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73 Tahun 2023 agar rumusan perhitungan analisa harga satuan di lapangan menjadi lebih efektif. Selain itu, dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2023 terdapat harmonisasi mekanisme pembahasan usulan HPS oleh setiap Unit Organisasi agar nilai HPS lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Perbaikan regulasi melalui standarisasi tata cara dan substansi reviu HPS juga diberlakukan pada tingkat unit kerja, dalam hal ini Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), agar penyusunan HPS lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Perbaikan regulasi tersebut menjadikan adanya perbedaan regulasi dan penggunaan sumber data harga satuan. Hal tersebut menjadikan menjadikan aplikasi SIPASTI tidak dapat digunakan sebagai pembanding bagi HPS dan perkiraan anggaran biaya pekerjaan konstruksi yang disusun sebelum adanya aplikasi SIPASTI.

Pengembangan aplikasi SIPASTI merupakan langkah nyata untuk peningkatan kualitas penyusunan HPS di Kementerian PUPR, dalam hal yang lebih luas merupakan awal dari langkah besar untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Setiap pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan HPS, diharapkan dapat mendukung upaya Kementerian PUPR agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh banyak pihak, terutama masyarakat luas. Kedepannya, agar aplikasi SIPASTI dapat andal, dipercaya, dan mencapai tujuannya, sudah barang tentu *continuous improvement* akan terus dilakukan serta besar harapan masukan dan langkah korektif dari berbagai pihak pengguna SIPASTI baik dari internal maupun eksternal Kementerian PUPR dapat menjadikan aplikasi tersebut sebagai perwujudan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.\*

# Pembangunan Infrastruktur Dorong Kemajuan Bangsa



Penulis:

**Kristinawati Pratiwi Hadi**  
Pranata Humas Ahli Madya

**P**embangunan Infrastruktur mendorong kemajuan bangsa, sebab dengannya pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat dicapai. Di tahun 2023, Bank Dunia (*World Bank*) membagikan skor infrastruktur pendukung kinerja logistik terhadap 139 negara di dunia. Negara yang mengantongi skor infrastruktur tertinggi adalah Singapura, dengan capaian 4,6 poin diikuti oleh Swiss yang mendapat skor 4,4 poin kemudian Jerman dan Kanada dengan perolehan skor yang sama, yakni 4,3 poin, dan selanjutnya ditempati oleh Finlandia, Belanda, Swedia, Jepang dengan skor yang sama, yakni 4,2 poin. Sedangkan Indonesia baru mengantongi skor sebesar 2,9 poin. (katadata.co.id, 2023)

Presiden RI Joko Widodo juga mengatakan pemerintah telah membangun beragam infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur pelayanan masyarakat. "Negara sebesar Indonesia dengan 17 ribu pulau semuanya membutuhkan yang namanya

infrastruktur. Infrastruktur konektivitas berupa jalan, pelabuhan, airport, semuanya dibutuhkan. Infrastruktur dalam rangka penyediaan air dimulai dari bendungan, irigasi, dan juga infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan: rumah sakit, sekolah, pasar rakyat, semuanya juga dibangun oleh pemerintah, dikerjakan oleh PUPR," ujar Jokowi pada acara Silaturahmi Presiden RI dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke-78 di Istana Negara, Desember 2023. (setkab.go.id, 2023)

Presiden Jokowi memandang penting pembangunan infrastruktur karena infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain. Dimana menurut *IMD Global Competitiveness Index* bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 menjadi peringkat 51 pada tahun 2023. (setkab.go.id, 2023)

Melalui terbitnya Perpres Nomor 52 Tahun 2023, Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dengan tema 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Berdasarkan tema tersebut ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, dimana diantaranya adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pembangunan infrastruktur tahun 2024 juga menjadi pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi. Dengan demikian, Industri konstruksi sebagai penyokong terlaksananya Pembangunan Infrastruktur diharapkan mampu tumbuh tinggi sebesar 6,4-6,7 %, didorong oleh penuntasan pembangunan pada tahun akhir periode RPJM Nasional 2020-2024 serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Hal tersebut didapatkan dari investor yang akan menanamkan modalnya, dimana pada tahun 2024, realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ditargetkan sebesar Rp1.450-1.650 triliun atau setara 21,59-23,39 Persen Pembentukan Modal Tetap *Bruto*. Penanaman investasi tersebut didorong pada proyek-proyek investasi swasta yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sekaligus mendorong inklusivitas, terutama pada proyek pembangunan infrastruktur dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Berdasarkan laporan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), besaran investasi swasta yang masuk dari bulan

September hingga Desember 2023 sebesar Rp 45 Triliun. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN selama periode tahun 2020 – 2024 adalah sebesar Rp60,99 triliun untuk 85 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar.

Meski demikian, pencapaian target pembangunan infrastruktur hingga tahun 2024 memiliki beberapa tantangan, diantaranya yaitu akses penyediaan dan akses pembiayaan perumahan khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah; pemenuhan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan persampahan; pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar pengelolaan Sumber Daya Air; pemenuhan infrastruktur untuk penyediaan sumber energi baru dan terbarukan; dan seterusnya.

Rantai Pasok Konstruksi menjadi pendukung Pembangunan Infrastruktur. Penyediaan rantai pasok tersebut masih menemui berbagai tantangan diantaranya *supply-demand* belum merata di semua daerah, pemanfaatan teknologi masih rendah, tuntutan mutu sumber daya konstruksi, kompleksitas industri konstruksi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, serta pembinaan rantai pasok yang masih terfragmentasi di berbagai instansi.

Menghadapi hal tersebut perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply*, perbaikan tata Kelola, integrasi, dan digitalisasi ekosistem rantai pasok, pembiayaan, dan penguatan sumber daya. Kesemuanya tersebut harus mendukung konstruksi berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan melalui rantai pasok hijau yang mengutamakan produk lokal dan ramah lingkungan (*green construction supply*).\*(tw)

# Transformasi Digital Sektor Konstruksi, Dorong Kemajuan Bangsa



Penulis:

**Kristinawati Pratiwi Hadi**  
Pranata Humas Ahli Madya

**T**eknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah merubah cara pandang maupun cara bekerja dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam tata kelola Pemerintahan. TIK telah mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dengan menerapkan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*.

Melalui SPBE Pemerintah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terkait hal ini pun arahan Presiden RI sangat tegas, bahwa digitalisasi birokrasi menjadi kewajiban. Sehingga setelah semua berbasis digital, berbagai celah dan potensi penyalahgunaan dapat dikurangi (menpan.go.id, 2023).

Beberapa negara telah sukses dalam penerapan transformasi digital, diantaranya seperti Estonia, Singapura, Korea Selatan, Australia, dan seterusnya. Estonia sudah dua dekade menerapkan transformasi digital. Upaya itu membuat Estonia dikenal sebagai negeri digital karena telah menerapkan *e-governance* sejak tahun 1997. Salah satu gebrakan paling terkenal adalah *e-residency* yang diperkenalkan pada 2014, untuk melayani penduduk dunia yang akan mengurus kependudukan di Estonia. Pada Februari tahun 2024, Kominfo menjajaki kolaborasi dengan Estonia untuk mempercepat transformasi digital nasional (kominfo.go.id, 2024). Sedangkan pada Maret tahun 2024, Menteri PANRB bertemu dengan Australian Chargé d'Affaires to Indonesia Steve Scott untuk menjajaki peluang peningkatan kerja sama Indonesia-Australia terkait transformasi digital (menpan.go.id, 2024).

Di Indonesia sendiri transformasi digital telah diaplikasikan oleh pemerintah dan memberikan efek

yang positif untuk masyarakat. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, Hasil Evaluasi SPBE pada Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2023 (sesuai Keputusan Menteri PANRB nomor 13 tahun 2024), didapatkan hasil antara lain untuk kategori K/L Kementerian Keuangan memperoleh penilaian terbaik yaitu 4,66 atau memuaskan, dan untuk kategori LPNK Lembaga Administrasi Negara mendapatkan penilaian terbaik yaitu 4,26 atau memuaskan.

Sedangkan untuk kategori Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, beberapa daerah yang berhasil memperoleh nilai membanggakan diantaranya Pemkab Pesisir Selatan dengan nilai 4,17 atau sangat baik, Pemprov DKI Jakarta dengan nilai 4,21 atau memuaskan, Pemkab Sumedang dengan nilai 4,14 atau sangat baik, Pemkot Banjarmasin dengan nilai 4,00 atau sangat baik, Pemkab Polewali Mandar dengan nilai 3,86 atau sangat baik, Pemprov Bali dengan nilai 4,07 atau sangat baik, dan seterusnya.

Transformasi digital bahkan menjadi salah satu dari 16 (enam belas) Proyek Utama yang dilaksanakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi turut berkomitmen dan terus berperan aktif dalam upaya mewujudkan transformasi digital melalui pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT). SIJKT sebagai suatu ekosistem digital berkolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal untuk mengintegrasikan data maupun aplikasi terkait guna menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholders* internal dan eksternal. Hal ini terutama untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta pelayanan publik.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan bahwa transformasi digital sektor konstruksi dilakukan untuk mendukung kemudahan

dan percepatan terkait perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pembinaan jasa konstruksi yang tepat sasaran. Sebagai contoh dengan terbangunnya ekosistem digital ini, durasi pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur dapat semakin cepat dan akuntabel.

Proses integrasi pada SIJKT dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi. Saat ini layanan SIJKT, meliputi layanan registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), layanan pencatatan pengalaman BUJK dan TKK, layanan pencatatan pembinaan tenaga kerja konstruksi, layanan pencatatan material dan peralatan konstruksi, layanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR, layanan pengelolaan kontrak konstruksi, serta layanan *database* harga satuan pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Tentunya upaya ini perlu didukung kapabilitas sumber daya PUPR yang mumpuni, terbuka dalam kolaborasi dan integrasi, cepat tanggap, serta berintegritas.

Peran masyarakat jasa konstruksi juga sangat dibutuhkan dalam percepatan implementasi transformasi digital dengan dukungan pengkayaan dan perwujudan standarisasi data, *crowd control* kevalidan data, serta masukan terkait kualitas standar dan pelayanan. Sehingga transformasi digital yang diwujudkan akan tepat merespon kebutuhan di lapangan.

Aksesibilitas menjadi poin yang tidak kalah penting dalam perubahan paradigma ini. Ditjen Bina Konstruksi berupaya meminimalisir gap aksesibilitas tersebut dengan mengoptimalkan peran unit pelaksana teknis dalam melakukan pembinaan. Diharapkan melalui transformasi digital sektor konstruksi pelayanan prima dapat terwujud sehingga pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. \*

# Kemudahan Proses PBJ dengan SIMPK

The logo for SIMPK (Sistem Informasi Material & Peralatan Konstruksi) features a stylized 'S' icon composed of three colored segments (yellow, blue, and white) followed by the letters 'SIMPK' in a bold, blue, sans-serif font.

## Sistem Informasi Material & Peralatan Konstruksi

Penulis:

**Ir. Achmad Darmawijaya, M.M.**  
*Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya*

**Hardiansyah, S.T., M.T.**  
*Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama*

**Siti Jauharoh Kartika Sari, S.I.Kom.**  
*Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama*

Tahun 2024 diperkirakan menjadi tahun puncak revolusi industri 4.0. Fenomena revolusi industri ini telah menjadikan seluruh sektor, termasuk di dalamnya sektor konstruksi untuk mengolaborasikan teknologi digital dan teknologi industri menjadi satu, dalam upaya meningkatkan efisiensi pada sektor konstruksi dan pada akhirnya mengurangi biaya secara signifikan.

Revolusi industri 4.0 mencakup di antaranya teknologi Big Data, yakni sekumpulan data yang sangat banyak, besar, kompleks, dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Tujuannya agar ada pertumbuhan data dan informasi yang sangat besar, memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan platform dan aplikasi penting dalam menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, termasuk di dalamnya tantangan dalam ketersediaan material dan peralatan konstruksi.

Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus berbenah mengikuti arus kemajuan untuk bertransformasi digital dalam industri konstruksi. Hal ini mengacu pada pengintegrasian teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kolaborasi. Transformasi digital dalam industri konstruksi juga termasuk penggunaan perangkat lunak yang memungkinkan dapat berkoordinasi semua kolaborasi, perencanaan, penyampaian, dan pemantauan proyek, semuanya dalam satu ruang yang tidak bergantung pada lokasi anggota tim.

Salah satu regulasi dalam transformasi digital dalam industri konstruksi adalah diterbitkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK). Peraturan ini mendorong para pemilik peralatan konstruksi untuk mencatatkan alat-alat yang mereka

miliki di dalam platform Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

Manfaat registrasi peralatan ini tentunya bisa dirasakan saat ini. Misalnya, dengan tercatat di SIMPK, pelaku jasa konstruksi secara otomatis dapat mengetahui apa saja kategori-kategori peralatan konstruksi, bagaimana ketersediaan unit-unitnya di setiap daerah, hingga lokasi persis di mana alat-alat tersebut berada. Transparansi harga produk-produk material konstruksi juga bisa dilihat di platform SIMPK ini.

Balai Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Timur, sebagai pelaksana teknis Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) konstruksi pemerintah di Wilayah Jawa Timur juga turut merasakan manfaat SIMPK. Menurut Gunawan Arif Wibowo salah satu kelompok kerja (Pokja) di BP2JK Wilayah Jawa Timur, dengan adanya *platform* SIMPK proses tender jasa konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) berlangsung lebih cepat. Pokja tidak perlu menghabiskan waktu untuk melakukan pengecekan apakah peralatan konstruksi benar-benar ada atau tidak. Tidak kalah penting, di lapangan, alat konstruksi yang dipakai sama persis dengan yang terdaftar di SIMPK.

Gunawan menjelaskan penggunaan perangkat lunak SIMPK untuk mendukung proses *tender* jasa konstruksi dengan memindai kode batang dokumen material dan kelengkapan alat konstruksi. Selanjutnya, informasi terkait alat konstruksi itu dapat diakses sesuai informasi yang dibutuhkan dalam tahapan *tender*. "Penggunaan SIMPK ini tentunya lebih ringkas, bisa menghemat waktu. Tinggal *scan QR Code* (kode respon cepat Red.) saja," ucap Gunawan.

Jika kita berjalan mundur di beberapa tahun ke belakang sebelum tahun 2020, setiap proyek pekerjaan yang akan dikerjakan, Pokja harus mengecek kelengkapan alat dan material satu per satu di lokasi jika diperlukan. Hal itu tentunya akan memakan banyak waktu dan biaya. Jika alat dan material sudah lengkap, barulah pekerjaan konstruksi bisa berjalan. Lain hal lagi bila alatnya lengkap, namun pekerjaan konstruksinya lebih dari satu, dan tempat antarpekerjaan yang terlampau jauh. Akibatnya, pekerjaan konstruksi terlambat karena mobilisasi alatnya yang juga terlambat.

Material dan peralatan konstruksi yang telah tercatat di SIMPK juga dipastikan telah mengimplementasikan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Jadi, ketidakpastian informasi terkait material konstruksi yang tidak bermutu juga dapat

diminimalisir. Sumber daya material konstruksi yang tercatat di SIMPK akan mendorong transparansi data harga produk dari material konstruksi. Pencatatan SDMPK bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi di seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi. Dengan adanya SIMPK ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik peralatan konstruksi dan material konstruksi. Sebab, di era digitalisasi ini, mereka harus siap terbuka atau transparan.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) telah mengamanatkan semua penyedia jasa konstruksi untuk melakukan pencatatan material dan peralatannya yang akan digunakan dalam proyek-proyek konstruksi sesuai dengan ketersediaan dan mutu yang bagus. Nomor pencatatan SDMPK berupa kombinasi enam belas huruf dan angka. Nomor pencatatan ini merupakan hasil pencatatan SDMPK yang telah memenuhi pemeriksaan dan keabsahan data, informasi, dan dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi SDMPK. Tanda pencatatan SDMPK yang berbentuk kode respon cepat ini dicetak secara mandiri oleh pemilik SDMPK dalam bentuk stiker dan direkatkan pada posisi yang mudah dipindai.

Era transformasi digital industri jasa konstruksi Indonesia tentunya mempermudah pelaksanaan proses *tender* jasa konstruksi termasuk bagi BP2JK Wilayah Jawa Timur. Transformasi digital dalam pelaksanaan proses *tender* jasa konstruksi juga menawarkan kondisi kerja yang lebih baik, efisien, meningkatkan kolaborasi, produktivitas, kualitas, dan keamanan produksi. Selanjutnya, tantangan ke depan untuk para Pokja adalah terus bertahan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak hanya untuk BP2JK Wilayah, namun untuk seluruh masyarakat konstruksi perlu bekerja sama untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang cerdas dan berkualitas serta teknologi dan fasilitas yang tepat, untuk menjawab tantangan dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, transformasi digital industri jasa konstruksi diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi industri, pelaku jasa konstruksi, dan masyarakat. Untuk itu, mari tetap positif dan adaptif terhadap perubahan yang ada.\*



*Launching Photo Gallery*  
**Konstruksi Indonesia**  
**2024**





## The Organizer



bindo Group adalah penyelenggara pameran terkemuka di Indonesia . Didirikan sejak tahun 1987, Debindo memiliki portofolio acara bisnis yang luas di Indonesia dan sekitarnya.

Sejak didirikan, kami secara konsisten menempatkan prioritas tertinggi untuk menjadikan acara sebagai platform bisnis utama bagi peserta pameran, pengunjung, dan mitra pendukung.





**DIRGAHAYU  
REPUBLIK INDONESIA**



**NUSANTARA  
BARU  
INDONESIA  
MAJU**



**Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan 12110